



IMPLEMENTASI PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BAQIR ASH SADR DI MASA PANDEMI COVID-19

Rahila Amanatul Ummah¹, Siti Nur Azizah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

Email Korespondensi: rahilaummah@gmail.com

azizahsiti4816@gmail.com

Abstract

One of the main ideas of Muhammad Baqir ash Sadr's economics is the responsibility of the government in the economic field. The COVID-19 pandemic has resulted in considerable changes in Indonesia. Even descriptive analysis has shown that this pandemic has caused supply and demand side problems in the Indonesian economy, a sharp decline in Indonesia's economic growth from around 5 percent to around 2 percent per year. This research is classified as Library research, where he conducts an in-depth understanding of research in the form of journals and other forms related to Baqr Ash Sadr's thoughts on government responsibility in the economic field. The existence of this policy is proof that the correlation between Baqr Ash Sadr's thoughts and the current reality is still relevant, that government intervention is in the form of wealth distribution which is realized in various programs with the aim of prospering the community in accordance with Baqr Ash Sadr's thoughts, regarding social security, distribution wealth and government intervention, in this case to do with the economy.

Keywords: Social security, social balance and COVID-19.

Abstrak

Salah satu pokok pemikiran ekonomi Muhammad Baqir ash Sadr adalah mengenai tanggung jawab pemerintah di bidang ekonomi. Pandemi COVID-19 mengakibatkan terjadinya perubahan yang cukup besar di Indonesia. Bahkan analisis deskriptif telah menunjukkan bahwa pandemi ini telah menyebabkan permasalahan di sisi permintaan dan penawaran dalam ekonomi Indonesia, adanya penurunan yang tajam terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia dari sekitar 5 persen menjadi sekitar 2 persen per tahun. Penelitian ini tergolong sebagai *Library research* (penelitian kepustakaan), dimana ia melakukan pemahaman secara mendalam penelitian berupa jurnal maupun bentuk lain yang terkait dengan pemikiran Baqir Ash Sadr mengenai tanggung jawab pemerintah di bidang ekonomi. Adanya kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa korelasi antara pemikiran Baqir Ash Sadr dengan kenyataan yang ada baru-baru ini masih relevan, bahwa intervensi pemerintah berupa



distribusi kekayaan yang diwujudkan dalam berbagai program dengan tujuan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan pemikiran Baqir Ash Sadr, tentang jaminan sosial, distribusi kekayaan dan intervensi pemerintah, dalam hal ini kaitanya dengan perekonomian.

Kata Kunci: Jaminan Sosial, Keseimbangan Sosial dan COVID-19.

Pendahuluan

Baqir Ash Sadr adalah tokoh intelektual muslim kontemporer, yang datang membawa gagasan original yang terkait dengan ekonomi Islam yang telah ia gali dari landasan doktrinal Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Aliran pemikiran Baqir Ash Sadr dalam perekonomian telah dijelaskan pada kitab *Iqtishaduna* (Gustiawati, 2019). *Iqtisaduna* merupakan salah satu karya fenomenal yang lahir dengan pendekatan legalistik, karya tersebut sukses melambungkan namanya sebagai tokoh teoritis dari kebangkitan Islam terkemuka. Didalamnya terdapat tiga bagian sub bab pembahasan dari kitab tersebut, yaitu dua bagian yang pertama membahas tentang berbagai kritik terhadap ekonomi sosial dan kapitalis. Bagian yang ketiga adalah bagian yang terkait dengan ekonomi islam, yang kemudian dikembangkan sebagai landasan pemikiran ekonomi Islam Baqir al-Sadr (Qomar, 2016).

Menurut Baqir al-Sadr ekonomi Islam merupakan sebuah doktrin, yang mana semua aturan dasar yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi dihubungkan dengan ideologinya, yakni yang dikaitkan dengan kesejahteraan dan keadilan sosial (Amarodin, 2018);(Amri & Gultom, 2022). Dalam doktrin ekonominya, keadilan sosial memiliki peran penting sebagai *masterpiece* pengungkap bagaimana semestinya ekonomi Islam berjalan. Beberapa pokok pikiran yang menjadi pembahasan Baqir al-Sadr dalam ekonomi Islam berkaitan dengan teori produksi maupun distribusi, serta peran pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat (Choiriyah, 2016a);(Ramdani, et al., 2022). Dalam konsepsi Baqir al-Sadr menyatakan bahwa pemerintah dalam pemerintahan memiliki dua peran penting sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diimplementasikan ke dalam jaminan sosial dan keseimbangan sosial.

Jaminan sosial secara garis besar didefinisikan sebagai skema pencegahan bagi masyarakat dari peristiwa ketidakamanan ekonomi, inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan pengangguran yang disebabkan oleh kebijakan publik yang bersifat ekspansif, sehingga transaksi pembelian dikurangi dan secara tidak langsung terdorong kearah kemiskinan (Azizah et al., 2022).



Keseimbangan sosial adalah aktivitas ekonomi yang didasarkan pada prinsip keseimbangan, yaitu prinsip yang kaitanya bukan hanya persoalan kebutuhan akan duniawi dan ukhrawi, tetapi prinsip yang digunakan juga ada kaitanya dengan keseimbangan akan kebutuhan masyarakat umum dan kebutuhan individu (Husni, 2018);(Amri et al., 2022).

Jaminan sosial dalam hal ini dikaitkan dengan dua hal, yang pertama semestinya masyarakat diberikan kesempatan luas dalam melakukan kerja produktif oleh negara, dengan tujuan setiap individu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya melalui hasil kerja tersebut serta usahanya sendiri. Bentuk jaminan sosial yang kedua adalah didasari pada fakta jika setiap individu memiliki kemampuan yang variasi, ditambah dengan keadaan dunia yang tidak stabil akibat pandemi COVID-19, termasuk Indonesia yang merasakan dampak adanya pandemi (Suparjan, 2010). Pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu penyebab dan penyumbang angka kemiskinan baru, disebabkan karena banyaknya pengangguran akibat PHK, pembatasan interaksi berskala besar karena PSBB. Sehingga jaminan sosial ditengah kehidupan masyarakat pada pandemi COVID-19 memiliki tingkat urgencitas yang sangat tinggi, sebab perekonomian di Indonesia sedang sangat kacau, hampir seluruh lapisan masyarakat terkena dampaknya, dari pedagang kecil sampai pegawai kantoran. Banyaknya pembatasan di era pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat memiliki pendapatan yang sangat minim hingga perlunya jaminan sosial guna terjadinya kesejahteraan masyarakat. Sehingga bisa dikatakan bahwa saat pandemi COVID-19 keseimbangan sosial juga mengalami goncangan yang tidak biasa, mulai dari kesehatan, hingga perekonomian.

Berbagai macam program yang telah dicanangkan oleh presiden sebagai bentuk upaya untuk mengatasi adanya dampak COVID-19. Program tersebut diantaranya: (1) Bantuan sembako; (2) Bantuan uang senilai Rp. 600.000.00 bagi warga yang terdampak COVID-19 yang belum masuk dalam DTKS; (3) BLT Dana Desa bagi keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp. 600.000.00 per bulan; (4) Listrik gratis bagi pelanggan yang terdampak pandemi COVID-1; (5) Kartu Pra Kerja untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan Pengangguran; (6) Subsidi gaji terhadap karyawan swasta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp. 5.000.000.00; dan (7) BLT usaha mikro kecil sebesar Rp. 2.400.000.00 (Ihsanuddin, 2020);(Said et al., 2022).

Pentingnya jaminan sosial sebagai salah upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang



telah dibuat pada masa COVID-19, sehingga menarik minat peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan membahas tentang penerapan pemikiran ekonomi muhammad baqir ash sadr yang relevan di masa pandemi COVID-19 yang berkaitan dengan jaminan sosial yang telah diprogramkan oleh pemerintah.

Tinjauan Pustaka

Program-program Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19

Banyak program-program pemerintah yang sudah dijalankan semasa pandemic COVID-19 ini, diantaranya: 1) Bantuan sosial reguler Kementerian Sosial (Program Keluarga Harapan yaitu pada program PKH memiliki target sebanyak 10 juta selain itu indeks bantuan disalurkan setiap April hingga Desember. Selain itu ada program Sembako yaitu pada program BPNT memiliki target sebanyak 20 Juta KPM, selain itu indeks bantuan juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 200.000. 2) Bantuan penugasan khusus presiden (Bantuan sosial sembako untuk warga DKI Jakarta dimana pada program ini memiliki target sebanyak 1,3 juta KK bagi warga yang terdampak COVID-19, bantuan sebesar Rp. 600.000/ bulan dan disalurkan selama 3 bulan pada April 2020. Selanjutnya bantuan sosial sembako untuk bodetabek, dimana ada program ini memiliki target sasaran sebanyak 600 ribu KK untuk warga yang terdampak COVID-19, bantuan sebesar Rp. 600.000/ bulan dan disalurkan selama 3 bulan pada april 2020.

3) Bantuan penugasan khusus presiden (bantuan sosial tunai untuk di luar Jabodetabek). Pada bantuan ini memiliki target sebanyak 9 juta KK bagi warga yang tidak menerima bantuan PKH maupun Program Sembako, bantuan sebesar Rp. 600.000/ bulan dan disalurkan selama 3 bulan. 4) Bantuan tanggap darurat kemensos. Programnya yaitu bansos sembako dan makanan siap saji kemensos warga DKI Jakarta. Pada bantuan ini telah menyalurkan sebanyak 300 ribu paket sembako bagi warga yang terdampak COVID-19 19 seharga Rp. 200.000/ paket dan telah disalurkan kemensos sejak 7-19 April 2020. Selain itu juga ada bantuan Santunan Kematian. Pada bantuan ini diberikan kepada keluarga ahli waris yang meninggal karena COVID-19 19 dan indeks bantuan sebanyak 15 juta/ jiwa.

Biografi Baqir Ash Sadr

Memiliki nama lengkap yakni asy syahid Muhammad Baqir as-sadr. Lahir di Kadhemie pada tahun 1935 (Amalia, 2010). Ia memiliki keluarga yang merupakan keturunan menganut paham syiah. Karena itu Baqir Ash



Sadr menjadi pemikir kontemporer yang menjadi pusat perhatian dari kalangan umat muslim maupun Non muslim (Choiriyah, 2016b). Pendidikannya diawali dari sekolah di Iraq dimana ia mempelajari fiqh, ushul dan teologi. Semasa sekolah, di usia 20 tahun ia memiliki prestasi yang menonjol dan memiliki intelektual yang baik. Semasa hidupnya Baqir As Sadr meleburkan diri dengan struktur sosial maupun interaksi aktif. Ia berkomunikasi dengan tokoh lainnya, bersentuhan dengan pemikiran yang sedang berkembang pada saat itu dan ikut dalam andil gerak pemikiran tersebut (Autoridad Nacional del Servicio Civil, 2021);(Amri, 2022).

Diusia yang masih muda Sadr mendapatkan gelar sebagai Mujtahid Mutlaq hingga menjadi otoritas pembeda, karena memiliki bakat intelektual yang detail ia seringkali bermain dalam isu kontemporer. Dapat dilihat fakta akan hal penguasaannya di berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, ekonomi, sosiologi, sejarah dan hukum. Dua karya milik Baqir Ash Sadr dalam bidang filsafat dan ekonomi dapat dirujuk dalam falsafatuna dan Iqtishaduna. Menurutnya ekonomi Islam merupakan sebuah doktrin, yang semuanya akan dihubungkan dengan aturan dasar yang ideologinya mengenai kesejahteraan dan keadilan sosial (Amarodin, 2018).

Pokok Pikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash Sadr

1. Definisi Ekonomi Islam

Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang memiliki hubungan antara kehidupan ekonomi, peristiwa, gejala lahiriah ataupun hubungan pada peristiwa dan fenomena tersebut. Lalu doktrin ekonomi ialah cara memecahkan sebuah masalah perekonomian yang sedang dihadapi oleh seseorang. Ia menyimpulkan jika ekonomi Islam adalah doktrin dan bukan ilmu pengetahuan, karena hal ini merupakan cara yang diajarkan dalam Islam dan mengejar kehidupan ekonomi, bukan merupakan suatu penafsiran yang dengannya Islam telah menjelaskan mengenai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum yang berlaku.

2. Karakteristik Ekonomi Islam

Konsep kepemilikan yang ditawarkan adalah kepemilikan multi jenis. Bentuk kepemilikan terdiri dari 2 yakni kelompok kepemilikan swasta dan kelompok kepemilikan bersama dan terbagi kembali dalam dua bentuk yakni kepemilikan publik dan kepemilikan Negara. Kepemilikan swasta secara singkat hanya terbatas pada penggunaan hak untuk melarang orang lain untuk menggunakan sesuatu yang telah menjadi miliknya. Bentuk kedua kepemilikan adalah kepemilikan bersama yang



terdiri dari dua yakni kepemilikan publik dan kepemilikan negara. Perbedaan dari kedua hal ini adalah tata cara pengelolaan kepemilikan.

3. Pandangan Islam tentang masalah Ekonomi

Permasalahan ekonomi lahir bukan dikarenakan sumber material maupun terbatasnya alam, akan tetapi telah dijelaskan dalam Q.S al-Qomar : 49 yang memiliki makna apabila tuhan telah menciptakan segala hal sesuai dengan ukuran masing-masing. Sehingga Sadr menyimpulkan jika masalah perekonomian muncul karena dua faktor yakni karakter manusia yang melakukan kezaliman terhadap manusia lainnya dan ingkar atas nikmat Allah. Sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Hal ini telah dikritisi jika permasalahan utama ekonomi adalah tidak membedakan pengertian dari kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*) (Qomar, 2016). Riba merupakan salah satu masalah perekonomian dalam islam sebagaimana Baqir Ash Sadr telah membahas mengenai atas haramnya riba dalam kitabnya yakni Iqtishoduna. Baqir Ash Sadr menekankan mengenai makna zahir yang dapat di tangkap (Sabrina, 2021). Dalam iqtishoduna dikatakan bahwa jika dunia disajikan dalam kerangka akhirat dan bekerjasama dengan saudara sehingga dijadikan kewajiban yang senilai dengan ibadah niscaya umat islam kedepannya mampu memajukan taraf perekonomian bangsa (Sabrina, 2021);(Amri, et al., 2022).

4. Teori Produksi

Teori produksi meliputi dua aktivitas. Pertama aspek objektif yang berhubungan dengan sisi teknis dan ekonomis yang terdiri dari sarana yang digunakan, dan pengelolaan kekayaan alam telah dikelola pada aktivitas produksi. Kedua aspek subjektif yang terdiri dari motif psikologis, tujuan yang hendak dicapai melewati aktivitas produksi dan evaluasi aktivitas produksi dengan konsep yang telah dianut. Sumber asli produksi terdiri dari tiga yaitu alam, modal dan kerja. Sumber alam yang digunakan untuk aktivitas produksi dibagi menjadi tiga kelompok yakni tanah, substansi primer dan aliran air. Dalam pertumbuhan produksi, sadr telah menggagas dua strategi (Fachri et al., n.d.);(Luth'v et al., 2022) yaitu: 1) Strategi *doctrinal intelektual* (Pada strategi ini manusia yang bisa termotivasi lalu melakukan kerja keras akan dianggap sebagai ibadah dan memahami apabila telah diniatkan yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Mengacuhkan sumber menganggur, pengeluaran yang tidak stabil maupun mengeluarkan barang haram yang dilarang dalam islam). 2) Strategi *legislative/hukum*. Adanya aturan hukum yang membackup strategi



legislative yang ditawarkan oleh Baqir Ash Sadr yakni: tanah yang tidak digunakan diambil alih oleh negara dan diserahkan kepada masyarakat yang mampu mengerjakan lahan tersebut, adanya larangan pada pengambilan kepemilikan tanah secara pemaksaan, larangan pada transaksi yang tidak bermanfaat, pelarangan riba, ikhtikar, dan tindakan yang mubazir, dan melakukan kegiatan regulasi pasar dan mengontrol situasi pasar.

5. Distribusi Kekayaan

Distribusi kekayaan terdapat dua hal yang mencakup, yakni sumber produksi dan kekayaan produktif (Fachri et al., n.d.);(Amri et al., 2021). Pada distribusi sumber produksi terkait dengan tanah, mineral, aliran sungai dan kekayaan alam lainnya. Sedangkan pada kekayaan produktif yang dimaksudkan adalah terdiri pendapatan dan kekayaan dalam islam (Zakariya & Arifin, 2020). Kegiatan distribusi yang telah dilakukan dalam islam yakni dibuat untuk memandu para pelaku ekonomi, pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan kegiatan distribusi yang sesuai dengan tuntunan islam (Zakariya & Arifin, 2020).

6. Tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi

Tanggung jawab maupun fungsi pemerintah dibidang ekonomi terdiri sebagai berikut : a) Jaminan sosial ditengah kehidupan masyarakat. Terdapat dua hal yang terkait dengan jaminan sosial yakni negara memiliki peran dalam adanya kesempatan setiap individu untuk melakukan pekerjaan yang maksimal sehingga kedepannya masyarakat mampu mencukupi kebutuhan hidup dari kerja ataupun usaha yang dijalankan. Lalu yang kedua adalah setiap masyarakat memiliki kemampuan yang beraneka ragam. b) Mewujudkan keseimbangan sosial. Konsep keseimbangan sosial terdiri dari keseimbangan yang didasari dua hal. Pertama fakta kosmik dan kedua fakta doktrinal (Gustiawati, 2019). Fakta kosmik adalah perbedaan yang sangat mencolok di kehidupan masyarakat. Fakta ini tidak bisa diingkari jika setiap individu memiliki potensi secara alamiah yang berbeda beda. Sedangkan fakta doktrinal merupakan hukum distribusi yang menjelaskan terwujudnya kepemilikan pribadi membawa pada konsekuensi yang melekat pada dirinya.

Dalam upaya mewujudkan tujuan ini, Islam memberi penjelasan jika semakin tinggi standar hidup maka akan berperilaku berlebih-lebihan pula, sehingga diharapkan para masyarakat memiliki hidup yang sesuai dengan standar hidup mereka. Sehingga terwujudnya standar hidup antara satu sama lain dan kemudian memunculkan standar hidup pada setiap individu. Standar hidup ini memiliki makna adanya



perbedaan derajat tapi tidak ada standar hidup yang bertolak belakang seperti masyarakat kapitalis. (Ash Sadr, 2008, hal. 470). c) Prinsip intervensi negara. Campur tangan negara tidak hanya meliputi pada sekedar mengadaptasi aturan hukum islam yang permanen, akan tetapi juga mengisi yang tidak tercantum dalam hukum islam. (Ash Sadr, 2008, hal. 485)

Dalam kehidupan ekonomi terdapat beberapa hubungan manusia dengan alam, yakni bagaimana cara manusia bereproduksi dan kendalinya atas alam. Adanya perbedaan antara dua jenis hubungan ini adalah terwujudnya hubungan pertama apakah terkait dengan seseorang yang hidup dalam masyarakat. Manusia akan tetap terkait dengan alam dalam suatu hubungan tertentu yang akan dibatasi dengan pengalaman dan pengetahuan. Dan adanya pengalaman dan pengetahuan yang berbeda akan meningkatkan level pemahaman individu dengan alam dan akan mengembangkan kebutuhan dan keinginan setiap individu. Lalu hubungan antar manusia bersifat tetap. Dan masyarakat yang memperoleh kendali atas kekayaan, kedepannya dihadapkan dengan masalah keadilan distribusinya serta penentuan hak individu dan masyarakat, baik ketika aktivitas produksi berada di level tertinggi kepada level terbawah. Islam telah mengadakan interpretasi ini dengan adanya hak intervensi negara, sehingga kepala negara memiliki kaitan terkait aplikasi hukum distribusi agar tidak terjadi penyimpangan distribusi. Sebagaimana ada seorang telah mereklamasi tanah mati dan luas tanah tersebut telah melebihi batas yang telah diberikan dari gagasan keadilan sosial Islam (Syafrinaldi et al., 2014).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian literatur (*Library research*). Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan kerangka ilmiah yang terarah dan baik. Penelitian literature digunakan untuk mendalami literatur yang sesuai dengan permasalahan, yaitu dengan cara melakukan pemahaman secara mendalam penelitian berupa jurnal maupun bentuk lain yang terkait dengan pemikiran Baqr Ash Sadr tentang tanggung jawab pemerintah di bidang ekonomi. Hasil telaah dari berbagai kajian literatur ini digunakan untuk memahami pemikiran Baqir Ash Sadr mengenai Implementasi pemikiran ekonomi baqir ash sadr di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini juga tergolong sebagai studi tokoh, karena mendalami pemikiran tokoh Baqir Ash Sadr.



Hasil dan Pembahasan

Implementasi Pemikiran ekonomi Baqir Ash Sadr di masa Pandemi COVID-19

Islam telah memberikan penegasan perihal tugas negara sebagai salah satu penyedia jaminan sosial sebagai upaya untuk memelihara standar kehidupan masyarakat. Kaitanya dalam pemikiran Baqir ash Sadr adalah mengenai jaminan sosial, pertama negara akan memberikan setiap individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya. Kedua jaminan sosial ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap masyarakat memiliki kemampuan bervariasi. Dalam hal ini jika masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan aktivitas kerja produktif sebagaimana yang dimaksudkan yang pertama tadi, maka negara memiliki kewajiban untuk mengaplikasikan jaminan sosial dengan cara memberikan bantuan secara tunai untuk mencukupi kebutuhan hidup dan memperbaiki standar hidupnya (Choiriyah, 2016a).

Sebagaimana praktiknya di Indonesia, sebagai salah satu negara yang terkena dampak COVID-19, yang berarti kegiatan kinerja produktif dari masyarakat tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan, sebab pembatasan skala besar atau PBB serta PHK mahal yang dilakukan oleh sebagian perusahaan, maka pemerintah juga telah melaksanakan beberapa kebijakan yang dijadikan sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari dampak yang nyata yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19, diantara kebijakan yang dilaksanakan pemerintah adalah kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi, yaitu pemberian jaminan sosial yang diwujudkan dalam beberapa program, diantaranya Program Jaring Pengaman Sosial atau jaminan sosial bagi keluarga miskin dan rentang yang terdampak COVID-19 yang direncanakan oleh kemensos terdiri dari bantuan sosial reguler kementerian sosial, Bantuan penugasan khusus presiden (bantuan sosial tunai untuk di luar jabodetabek) dan bantuan tanggap darurat kemensos (KEMENSOS, 2021).

Program bantuan sosial reguler kementerian sosial yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) pada program ini memiliki target sasaran sebanyak 10 juta KPM dan indeks bantuan disalurkan per 3 bulan. Kemudian program sembako (BPNT) target sasaran sebanyak 20 juta KPM dan indeks bantuan yang disalurkan sebesar Rp. 200.000. Lalu bantuan yang pertama adalah bantuan sosial sembako untuk warga DKI Jakarta program ini memiliki target 1,3 juta KK warga yang terdampak COVID-19, bantuan yang diberikan senilai Rp. 600.000 setiap bulan untuk satu keluarga dan disalurkan selama 3 bulan. Kedua, bansos sembako



untuk bodetabek target sasaran sebanyak 600 ribu kk warga yang terdampak COVID-19, bantuan senilai Rp. 600.000 setiap keluarga dan akan disalurkan selama 3 bulan. Program yang terakhir adalah bantuan tanggap darurat kemensos terdiri dari bantuan sosial sembako dan makanan siap saji kemensos warga DKI Jakarta pada penyalurannya sebanyak 300 ribu paket sembako warga yang terdampak COVID-19 senilai Rp. 200.000 setiap paket dan bantuan santunan kematian yang diberikan kepada keluarga ahli waris yang meninggal karena COVID-19 dan indeks bantuan yang diberikan senilai 15 juta per jiwa (Kemensos, 2020).

Pemberian jaminan yang diberikan pemerintah melalui program bantuan sosial juga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam produksi dan konsumsi, sebab suntikan dana yang masuk kepada masyarakat digunakan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa pandemi. Selain memberikan dampak terhadap peningkatan produksi dan konsumsi bantuan pemerintah juga menjadi salah satu upaya untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat juga membantu para pelaku ekonomi, pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan kegiatan distribusi yang sesuai dengan tuntunan islam (Zakariya & Arifin, 2020).

Di masa pandemi dimana masyarakat kesulitan dan mengalami penurunan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagai dampak dari kebijakan yang menganjurkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan di rumah, dan adanya pembatasan interaksi dalam satu tempat juga mengakibatkan pengurangan jumlah pegawai di hampir seluruh perusahaan serta pemotongan gaji sebagai upaya untuk mempertahankan keberlangsungan dari perusahaan tersebut.

Dari kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menjamin kehidupan masyarakat dari kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya akibat pandemi COVID-19 sudah sesuai dengan pemikiran Baqir Ash Sadr tentang kewajiban pemerintahan di bidang ekonomi yang berhubungan dengan jaminan sosial dan keseimbangan sosial. Dengan kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa korelasi antara pemikiran Baqir Ash Sadr dengan kenyataan yang ada baru-baru ini masih relevan, bahwa intervensi pemerintah berupa distribusi kekayaan yang diwujudkan dalam berbagai program dengan tujuan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan pemikiran Baqir Ash Sadr, tentang jaminan sosial, distribusi kekayaan dan intervensi pemerintah, dalam hal ini kaitanya dengan perekonomian.



Program kegiatan tersebut yang ditujukan sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di masa pandemi tidak akan maksimal hasilnya jika tidak dilaksanakan bersama-sama. Kesadaran masyarakat yang memiliki kemampuan lebih dalam hal ini adalah yang masih memiliki pemasukan meskipun keterbatasan keadaan, juga penting untuk dilakukan dalam hal ini berkaitan dengan kesadaran untuk mendistribusikan hartanya kepada tetangga yang terdampak, sehingga Kerjasama yang dilaksanakan masyarakat dan pemerintah akan lebih maksimal, karena jangkauan akan lebih luas, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

Kesimpulan

Pemikiran Baqir Ash Sadr terkait Ekonomi Islam yang berisi tentang teori produksi dan distribusi, serta peran pemerintah dalam bidang ekonomi, dalam hal tersebut tentang upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di masa pandemi COVID-19 yang bukan hanya dirasakan oleh masyarakat dunia, namun juga Indonesia yang dampaknya bukan hanya terkait Kesehatan namun juga berdampak pada keguncangan perekonomian, yang menyebabkan angka kemiskinan baru. Sehingga jaminan sosial ditengah kehidupan masyarakat pada pandemi COVID-19 penting sebab perekonomian di Indonesia sedang sangat kacau, hampir seluruh lapisan masyarakat terkena dampaknya. Keterkaitan pemikiran Baqir Ash Sadr dengan kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan pemerintah dalam membuat kebijakan sebagai upaya untuk menanggulangi dampak COVID-19 sudah relevan, bahwa intervensi pemerintah berupa distribusi kekayaan yang diwujudkan dalam berbagai program dengan tujuan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan pemikiran Baqir Ash Sadr, tentang jaminan sosial, distribusi kekayaan dan intervensi pemerintah, dalam hal ini kaitanya dengan perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarodin, M. (2018). Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer (Abu A'la Al-Maududi, Baqir Ash-Sadr, dan Adiwarmarman A. Karim). *Eksyar*, 5(1), 41–55.
- Amri, A. (2022). The influence of product quality, service quality and trust on customer loyalty in Honda Scoopy brand motorcycles PT. Hayati Pratama Mandiri. *Marketing Management Studies*, 2(1), 10.



- Amri, A., & Gultom, M. S. (2022). Gambaran harga saham ditinjau dari tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga: Studi kasus perusahaan yang terdaftar di indeks Iq45. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 7(2), 22.
- Amri, A., Ramdani, Z., Warsihna, J., & Tae, L. F. (2022). The Development and Validation of Financial Management Behavior (FMB) Scale in Postgraduate Students. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 22(2), 189. <https://doi.org/10.25124/jmi.v22i2.4006>
- Amri, A., Widyastuti, T., & Bahri, S. (2021). *Analisis korelasional financial attitude, financial knowledge dan spiritual intelligence pada mahasiswa pascasarjana*. 6(1), 12.
- Autoridad Nacional del Servicio Civil. (2021). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Azizah, S. N., Febriani, R., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2022). *Implementasi zakat sebagai islamic social security menurut pandangan muhammad nejatullah siddiqi*. 07(01).
- Choiriyah. (2016a). Pemikiran ekonomi muhammad baqir. *Islamic Banking*, 2(1), 49–58.
- Choiriyah. (2016b). Pemikiran ekonomi muhammad baqir. *Islamic Banking*, 2(1), 49–58.
- Fachri, A. Z., Jetis, J., Gg, K., Rt, N., Surabaya, W., Sambang, M., & Modo, R. (n.d.). *Baqir Al-Sadr*. 9(265).
- Gustiawati, S. (2019). *Jurnal Ekonomi Syariah*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 67–76.
- Husni. (2018). *Konsep Equilibrium (Keseimbangan Sosial) Menurut Baqir Shadr*. 0298, 323706.
- KEMENSOS. (2021). Program Jaring Pengaman Sosial Kementerian Sosial | Kementerian Sosial Republik Indonesia. In *Kemensos.Go.Id* (p. 1).
- Luth'v, W. A., Sena Wangi, B. A., Lestari, R. A., Abidah, E. E., Salsabila, E., & Amri, A. (2022). Strategi pelayanan perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam meningkatkan pengguna jasa transformasi kereta api. *Insight Management Journal*, 2(2), 75–80. <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.153>
- Qomar, M. N. (2016). Telaah Kritis Masalah Ekonomi Perspektif Muhammad Baqir al-Sadr. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–14.
- Ramdani, Z., Amri, A., Hadiana, D., Warsihna, J., Anas, Z., & Susanti, S. (2022). *Students Diversity and the Implementation of Adaptive*



- Learning and Assessment: A Systematic Literature Review*. Interdisciplinary Conference of Psychology, Health, and Social Science (ICPHS 2021), Makassar, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220203.025>
- Ramdani, Z., Hadiana, D., Amri, A., Warsihna, J., Widodo, W., Chandra, D. T., & Sopandi, E. (2022). The mediating role of attitude in the correlation between creativity and curiosity regarding the performance of outstanding science teachers. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 11(3), 8.
- Sabrina, L. (2021). Konsep Keharaman Riba: Studi Atas Pemikiran Muhammad Bâqir Aş-Şadr dalam Iqtisâdunâ. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 7(1), 103–116. <https://doi.org/10.32699/syariat.v7i1.1854>
- Said, A., Susanto, E., & Amri, A. (2022). Analisis penerapan sistem pengelolaan dana terpadu Muhammadiyah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13, 15.
- Suparjan. (2010). Jaminan Sosial Berbasis Komunitas: Respon Atas Kegagalan Negara dalam Penyediaan Jaminan Kesejahteraan. *Jurnal Universitas Gadjah Mada*, 13(3), 1–19.
- Syafrinaldi, A., Dan, S., Fakultas, R., Dan, S., Univeritas, H., Negeri, I., Syarif, S., Riau, K., Kunci, K., Distribusi, :, & Produksi, D. (2014). Analisa Pemikiran Muhammad Baqir Ash Shadr Tentang Teori Distribusi Dan Keterkaitannya Dengan Produksi. *Hukum Islam*, XIV(1), 162–173.
- Zakariya, N. A., & Arifin, S. (2020). Distribusi dalam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 143. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6870>

